

PENDIDIKAN UNTUK SEMUA

SEJARAH, KONDISI PENDIDIKAN SETELAH JOMTIEN DAN DAKAR, DAN TINDAKAN YANG PERLU DILAKUKAN

Riswan Lapagu

Direktur Executif *The Centre for the Betterment of Education (CBE)*

Economic crisis which has ravaged Indonesia since 1997 has some effects on the ability of parents in financing their children's education. The result is that the number of dropouts in each type and level of education has steadily increased. Another impact of the situation is the involvement of so many school age children in various fields of work resulting in their dropout. This situation has clearly shown that access to basic education has met some constraints. To give equal opportunity to all people in education, Indonesian Government has adopted Education for all policy. This article is trying to expose the history of the movement Education for All, the desired goal, the progress and constraints at a global scale, the condition of Education for All movement in Indonesia, and whatever we can do about it.

A. Pengantar

Pendidikan adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan merupakan hak setiap orang. Hak untuk mendapatkan pendidikan ini menjadi salah satu butir dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang sudah dicanangkan sejak tahun 1949 dan dengan demikian lebih dari 50

tahun yang lalu. Hak untuk mendapatkan pendidikan ini bahkan dijadikan prioritas tertinggi dalam pertemuan Hak Asasi Manusia PBB pada tahun 1980, karena disadari dan dirasakan bahwa krisis pendidikan menimbulkan dampak yang jauh lebih buruk dibandingkan dengan bencana alam.

Pada saat itu kondisi pendidikan memang semakin memburuk. Da-

lam *World Declaration on Education for All*, disebutkan bahwa secara global, lebih dari 100 juta anak, 60 juta diantaranya adalah anak perempuan, belum mengenyam pendidikan dasar; lebih dari 960 juta orang dewasa, dua pertiga diantaranya perempuan, masih buta huruf dan buta huruf adalah masalah signifikan tidak hanya di negara maju tetapi juga negara berkembang; lebih dari dua pertiga orang dewasa tidak memiliki akses terhadap media cetak dan teknologi yang bisa membantu mereka untuk memperbaiki kualitas hidup dan membantu mereka membentuk dan beradaptasi terhadap perubahan sosial dan budaya; lebih dari 100 juta anak dan orang dewasa yang tidak terhitung jumlahnya tidak lulus pendidikan dasar. Masalah lain yang tidak kalah pentingnya adalah mereka yang lulus dari pendidikan dasar, yang jumlahnya lebih besar, tidak betul-betul mendapatkan pengetahuan dan kemampuan yang memadai. Dengan demikian, masalahnya tidak hanya angka partisipasi terutama bagi perempuan, tetapi juga kualitas pendidikan itu sendiri.

Untuk menyikapi permasalahan-permasalahan pendidikan yang semakin memburuk ini, the World Bank, UNESCO, UNICEF, dan UNDP mengadakan *The World Conference on Education for All/EFA* (Konferensi Dunia tentang Pen-

didikan untuk Semua) di Jomtien, Thailand pada tanggal 5-10 Maret 1990. Berangkat dari permasalahan pendidikan ini, Konferensi Pendidikan untuk Semua ini dimaksudkan untuk menekankan kembali bahwa pendidikan adalah hak mendasar setiap orang sekaligus mengajak untuk berpikir dan melakukan tindakan kolektif untuk menyediakan pendidikan dasar kepada setiap orang.

Konferensi ini telah melahirkan sebuah deklarasi yang dikenal dengan *The World Declaration on Education for All* (Deklarasi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua), yang mengacu pada peletakan pendidikan sebagai prioritas tertinggi dalam Deklarasi Universal HAM. Deklarasi ini menargetkan tersedianya pendidikan dasar bagi semua pada tahun 2000. Akan tetapi target ini tidak tercapai dan dalam pertemuan *World Education Forum* pada tahun 2000 di Dakar, Senegal target ini dijadwalkan kembali. Pertemuan ini juga melahirkan rencana aksi global untuk kampanye Pendidikan untuk Semua.

B. Sejarah Gerakan Pendidikan untuk Semua

Gerakan Pendidikan untuk Semua sudah dimulai sejak tahun

1980an ketika kondisi pendidikan secara global sedang mengalami penurunan baik dalam kualitas dan kuantitasnya. Oleh karenanya dirasakan adanya kebutuhan untuk melakukan tindakan bersama untuk memperbaiki pendidikan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Gerakan bersama ini kemudian dikukuhkan dalam Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua di Jomtien pada tahun 1990. Berikut adalah ringkasan 'sejarah' gerakan Pendidikan untuk Semua dari semenjak tahun 1990.

Tahun 1990 diadakan Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua di Jomtien, Thailand. Konferensi ini diadakan oleh the World Bank (WB), UNESCO, UNICEF, dan UNDP dan diikuti oleh kurang lebih 1500 peserta perwakilan dari 155 negara, 125 lembaga nonpemerintah serta institusi-institusi lainnya. Konferensi ini menghasilkan deklarasi dan kerangka kerja bersama di tingkat global, regional, dan nasional. Deklarasi Pendidikan untuk Semua tingkat dunia ini menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan pendidikan dasar untuk semua dan perluasan visi ke depan serta pembaruan komitmen untuk mencapai target Pendidikan untuk Semua.

Visi gerakan Pendidikan untuk Semua pada tahun 1990 adalah 1) penyediaan akses Pendidikan untuk

Semua dan penekanan pada keadilan, 2) pemfokusan pada pembelajaran, 3) perluasan fasilitas dan wilayah pendidikan dasar, dan 4) penguatan kerjasama. Sedangkan target yang ingin dicapai dalam konferensi ini meliputi enam aspek yaitu 1) perluasan pelayanan dan pengembangan anak sejak dini, 2) penyediaan akses untuk pendidikan dasar kepada semua pada tahun 2000, 3) perbaikan pencapaian pembelajaran, 4) pengurangan tingkat buta huruf orang dewasa, 5) perluasan pendidikan *life skill* yang diperlukan oleh pemuda dan orang dewasa, dan 6) peningkatan penguasaan pengetahuan, kemampuan, dan nilai-nilai yang diperlukan oleh individu dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan mereka.

Beberapa negara menyikapi agenda ini dengan membuat tim nasional Pendidikan untuk Semua yang bertugas untuk membuat rencana aksi nasional di negara masing-masing untuk merealisasikan agenda Jomtien ini. Rencana aksi ini ditujukan untuk mengevaluasi sistem pendidikan, memformulasikan kebijakan untuk memperbaiki sistem pendidikan, menguatkan kapasitas manajemen masyarakat dan institusi, menciptakan lingkungan yang lebih memungkinkan untuk pembuatan kebijakan, memperluas kerjasama, dan menggali

metode untuk menyediakan pendidikan dasar untuk semua.

Deklarasi Jomtien ini juga dikuatkan kembali pada konferensi-konferensi yang dilaksanakan oleh PBB, khususnya pada Konferensi tentang Kependudukan dan Pembangunan di Rio de Janeiro tahun 1992, Konferensi tentang Pembangunan Sosial di Copenhagen, dan juga konferensi dunia tentang perempuan di Beijing pada tahun 1995.

Pada tahun 1995 jelas terlihat bahwa target yang dibuat dalam Deklarasi Jomtien tidak akan tercapai. Pada waktu yang bersamaan, di Copenhagen dilaksanakan *World Summit for Social Development* dan target pencapaian penyediaan pendidikan dasar untuk semua pada tahun 2000 dirubah menjadi tahun 2015.

Maret 1999 *Oxfam* meluncurkan kampanye *educationnow*. Kampanye publik *Oxfam* dimulai dengan memfokuskan pada hutang-hutang negara miskin dan bagaimana hutang-hutang ini sangat menjadi hambatan untuk berinvestasi dalam pendidikan. Selanjutnya bulan September ada pertemuan IMF dan WB. Dalam pertemuan ini *Oxfam* menghendaki pendefinisian ulang peran dan fungsi IMF sebagai salah satu badan moneter internasional terkuat karena badan ini dilihat

sebagai penyebab utama semakin terpuruknya negara-negara dunia ketiga.

Pada bulan April tahun 2000, PBB menggelar Forum Pendidikan Dunia di Dakar, Senegal. Forum ini didahului dengan pertemuan di enam wilayah regional Pendidikan untuk Semua untuk mengevaluasi target Pendidikan untuk Semua di wilayah regional. Enam wilayah regional tersebut adalah Afrika yang dilaksanakan di Johannesburg pada tanggal 6-10 Desember 1999, Asia Pasifik yang dilaksanakan di Thailand pada tanggal 17-20 Januari 2000, negara-negara Arab dan Afrika Utara yang dilaksanakan di Mesir pada 24-27 Januari 2000, sembilan negara berpenduduk terpadat yang dilaksanakan di Brazil pada 2-4 Februari 2000, Eropa dan Amerika Utara yang dilaksanakan di Poland pada 6-8 Februari 2000, dan wilayah Amerika yang dilaksanakan di Republik Dominik pada 10-12 Februari 2000. Evaluasi Pendidikan untuk Semua tahun 2000 ini secara keseluruhan diikuti oleh lebih dari 180 negara.

Forum Pendidikan Dunia di Dakar merupakan kelanjutan dari evaluasi Pendidikan untuk Semua tahun 2000 yang dilaksanakan di masing-masing wilayah regional. Berdasarkan temuan-temuan dan rekomendasi di enam wilayah

regional Pendidikan untuk Semua, forum ini menghasilkan *Global Framework for Action* (Kerangka Aksi Global) yang seringkali disebut *Dakar Framework for Action* dan menjadi agenda pendidikan di abad 21. Agenda pendidikan ini didesiminasi secara luas dalam beberapa bahasa yang berbeda dan didiskusikan dalam konferensi-konferensi pembangunan PBB tahun 2000.

Kerangka Aksi Dakar bertujuan untuk memberikan pengarah, memberdayakan, dan memungkinkan pemerintah, melalui kerja sama di tingkat lokal dan global, untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dasar bagi semua pada tahun 2015. Kerangka ini memperkuat kesepakatan yang sudah ditetapkan dalam *Jomtien Declaration*.

Kerangka Aksi Dakar memperkuat kembali dan memperluas deklarasi Jomtien, mengusulkan lima target operasional dan lima strategi untuk mencapai tujuan operasional tersebut. Lima target operasional tersebut meliputi; 1) perluasan pendidikan dan perawatan anak sejak usia dini pada tahun 2015, 2) pendidikan dasar yang gratis untuk semua pada tahun 2015, 3) pemenuhan kebutuhan pembelajaran untuk pemuda dan orang dewasa/life school education pada tahun 2015, 4) peningkatan kualitas

pendidikan dan evaluasi pembelajaran pada tahun 2015, dan 5) menghilangkan kesenjangan gender pada tahun 2015. Sedangkan lima tujuan strategisnya adalah 1) meningkatkan investasi dan mobilisasi sumberdaya yang efektif, 2) menciptakan lingkungan yang memungkinkan partisipasi masyarakat dan civil society, 3) menghubungkan pemenuhan pendidikan dasar dan strategi anti-kemiskinan, 4) menyediakan teknologi baru, dan 5) meningkatkan kualitas guru.

Dalam pertemuan ini, *the Global Campaign for Education* (GCE), sebuah jaringan global yang beranggotakan lembaga-lembaga yang peduli terhadap isu-isu dalam Kerangka Aksi Dakar, menekankan kepada pemerintah, IMF dan WB untuk mengadopsi Kerangka Aksi Global. GCE diakui oleh pemerintah dan badan-badan PBB sebagai motor perubahan dalam bidang pendidikan. Untuk mengkampanyekan tujuan dan strategi Pendidikan untuk Semua ini, dalam GCE mengusulkan untuk mengadakan *Week of Action* (Sepekan Aksi) pada bulan April setiap tahunnya.

Secara umum, target waktu dan pencapaian serta evaluasi yang ditetapkan dalam Deklarasi Dakar adalah:

- 1) Juni 2002
Kerangka Kerja Pembiayaan Pendidikan untuk Semua
- 2) September 2002
Pembiayaan langkah pertama Pendidikan untuk Semua
- 3) Desember 2002
Perencanaan Pendidikan untuk Semua di tingkat nasional sebagai bagian dari perencanaan pendidikan nasional
- 4) Januari 2003
Awal Dekade Melek Huruf PBB
- 5) 2005
Mengurangi kesenjangan gender di pendidikan tingkat dasar dan menengah
- 6) 2005
Konferensi Evaluasi Pendidikan untuk Semua di tingkat regional
- 7) 2010
Konferensi Evaluasi Pendidikan untuk Semua di tingkat global/internasional
- 8) 2015
 - Mencapai 50% peningkatan melek huruf, khususnya untuk perempuan, dan akses yang memadai bagi orang dewasa untuk melanjutkan pendidikan
 - Mencapai kesetaraan gender dalam pendidikan
 - Evaluasi Pendidikan untuk Semua di tingkat global

November 2000 diselenggarakan pertemuan Kelompok Kerja Pendidikan untuk Semua di Paris. Unesco mengundang sejumlah NGO untuk mendiskusikan kerangka aksi dan inisiatif global. Pada tahun 2001, terjadi serangkaian kegiatan; 1) GCE mengadakan Sepekan Aksi Pendidikan termasuk konferensi di India dan demonstrasi anak di Ghana dan Inggris (bulan April), 2) pertemuan G-8 di Italia membuat kelompok kerja di bidang pendidikan untuk mencapai target Deklarasi Dakar, bekerja sama dengan negara-negara berkembang, institusi internasional, dan stakeholder pendidikan (bulan Juli), 3) pada hari Melek Huruf Internasional, Oxfam GB di Inggris mengajak media dan publik untuk memperhatikan krisis pendidikan global (bulan September), dan 4) bulan November sebagai hari Anak Universal, Oxfam meluncurkan kampanyenya untuk menghapus biaya pendidikan – SPP sekolah dan

biaya lain seperti buku, pensil, pulpen dan buku- dalam waktu tiga tahun. Ini adalah langkah yang krusial untuk menyediakan pendidikan dasar yang gratis kepada semua.

Maret 2002 diselenggarakan Konferensi Pembangunan PBB. Konferensi ini tidak menghasilkan ukuran-ukuran yang konkret untuk kembali menarik perhatian dunia untuk mencapai target pendidikan yang sudah disepakati di Dakar. Tetapi Goerge Bush dan EU memberikan sejumlah dana untuk membantu pencapaian target Deklarasi Dakar. Selanjutnya April pada tahun yang sama GCE melaksanakan sepekan aksi pendidikan. Anggota kampanye pendidikan global berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan Sepekan Aksi Pendidikan di lebih dari 90 negara di dunia.

C. Kondisi Pendidikan setelah Jomtien dan Dakar

1. Perkembangan Global

a. Angka Partisipasi ke Sekolah

Dalam *The Oxfam Education Report 2000*, disebutkan bahwa angka partisipasi ke sekolah berbeda menurut region dan juga gender. Di Asia Selatan dan Afrika, sangat

banyak anak yang tidak berkesempatan mengenyam pendidikan dasar. Bahkan angka partisipasi pendidikan dasar kedua region ini paling rendah dibandingkan dengan region lain; di Asia Selatan angka partisipasinya hanya mencapai 56 juta dan Afrika lebih rendah lagi yaitu 45 juta.

Yang dinilai sudah cukup tinggi dan bahkan hampir mencapai pendidikan dasar universal adalah Asia Timur, Amerika Latin, dan Timur Tengah. Meski demikian, tingkat kenaikan partisipasi ini dirasakan masih terlalu lambat untuk bisa mencapai target pendidikan dasar bagi semua pada tahun 2015. Oxfam memperkirakan krisis pendidikan yang makin memburuk di wilayah Afrika yang juga akan mengantarkan pada kemiskinan.

b. Kesetaraan Gender

Mengacu lagi ke laporan pendidikan Oxfam 2000, setiap dua dari tiga anak perempuan di dunia belum memiliki akses terhadap pendidikan dasar. Kesenjangan ini sekali lagi banyak terjadi di Asia Selatan dan Afrika.

Global Campaign for Education (GCE) dalam rencana Global Actionnya tahun 2003 menjadikan kesenjangan gender ini sebagai pelajaran terbesar. Diyakini bahwa kesalahan terbesar selama ini adalah pengingkaran terhadap hak-hak

perempuan untuk memiliki akses membaca dan menulis yang merupakan alat untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Memasuki abad-21, menurut data GCE masih ada 70 juta anak perempuan yang tidak bersekolah dan 550 juta (satu diantara lima) perempuan dewasa yang buta huruf.

c. Tingkat Melek Huruf

Tingkat melek huruf banyak dipengaruhi oleh angka partisipasi dalam pendidikan dasar. Di tingkat global, sebagaimana disebutkan dalam *The Oxfam Education Report 2000*, tingkat melek huruf mengalami kenaikan kurang dari seperempat dari rata-rata yang ditargetkan. Estimasi yang dikutip oleh laporan ini mengatakan bahwa satu diantara lima penduduk negara berkembang di dunia masih buta huruf.

Laporan ini juga menyebutkan bahwa pada pertengahan tahun 1990an masih ada 872 juta penduduk negara berkembang yang masih buta huruf; dua pertiga di antaranya adalah perempuan dan lebih dari 60% kelompok buta huruf ini ada di Asia Selatan. Bahkan sekarang ini ada penambahan sebanyak 24 juta penduduk buta huruf dibandingkan tahun 1980 dan sebanyak 4 juta dibanding tahun 1990.

Semenjak tahun 1980, penurunan angka buta huruf hanya mencapai 15% dan sangat kecil dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk. Penurunan ini banyak terjadi di Asia Timur. Yang terjadi di Asia Selatan dan Afrika adalah justru kenaikan masing-masing sampai 17 juta dan 3 juta jiwa. Pada tahun 2000 diperkirakan jumlah buta huruf mencapai 881 juta dan kesenjangan gender dalam masalah ini masih tinggi.

d. Kualitas Pendidikan

Angka partisipasi bukanlah tujuan akhir, tetapi lebih merupakan sarana untuk mencapai pendidikan yang berkualitas. Namun untuk mengukur kualitas pendidikan tidaklah mudah, apalagi di tingkat global. Belum ada standar yang bisa dipakai secara internasional untuk mengukur kualitas pendidikan. Selain itu juga belum ada konsensus mengenai elemen-elemen yang harus diukur.

Meski demikian, melek huruf dan angka adalah dua indikator yang jelas-jelas harus ada dan penting sebagai kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh setiap orang. Dalam *The Oxfam Education Report 2000*, disebutkan bahwa di negara-negara industrialis dipakai dua pendekatan untuk mengukur kualitas pendidikan; *the effective*

approach yang menggunakan pendekatan kuantitas dan *the school improvement* yang lebih memfokuskan pada proses-proses yang terjadi di sekolah. Laporan ini juga menyebutkan bahwa secara umum, kualitas pendidikan bisa dipengaruhi oleh dan dengan demikian diukur dari guru, kurikulum, media bahasa, lingkungan sekolah, dan partisipasi masyarakat.

2. Perkembangan di Indonesia

a. Perawatan dan Pendidikan Usia Dini

Anak usia dini adalah anak usia 0-6 tahun. Program pelayanan dan pendidikan anak usia dini yang dimaksud oleh pemerintah adalah: 1) Pos Pelayanan Terpadu, 2) Bina Keluarga Balita (BKB), 3) Taman Kanak-kanak, 4) Tempat Penitipan Anak, 5) Raudhatul Atfal, 6) Kelompok Bermain, dan 7) Sekolah Dasar. Sampai pada tahun 2000, akses layanan untuk program ini masih rendah. Dari 26.172.763 anak usia dini baru 41% (10.794.534) saja yang terlayani. Salah satu sebabnya adalah masih terbatasnya jumlah lembaga yang menangani pendidikan dan perawatan anak usia dini. Bahkan jumlah terbesar anak usia dini ditampung di sekolah dasar. Dengan demikian, hanya anak

berusia 5-6 tahun saja yang terlayani. Dilihat dari perspektif gender, pemerintah tidak memiliki data yang menggambarkan kesenjangan atau kesetaraan dalam pelayanan ini.

Kendala yang menghambat pelayanan ini adalah 1) masih terbatasnya jumlah lembaga layanan pendidikan dan perawatan ini, karena pada umumnya lembaga-lembaga ini berada di kota besar, sedangkan sasaran layanan sebagian besar (hampir 60%) ada di pedesaan, 2) masih rendahnya kesadaran orang tua dan masyarakat tentang pentingnya layanan ini, 3) rendahnya tingkat sosial-ekonomi orang tua, 4) kurangnya sosialisasi layanan ini kepada masyarakat, 5) belum adanya program terpadu yang dapat memberikan layanan seutuhnya perawatan dan pendidikan, 6) belum intensifnya kerjasama antara pemerintah dan non-pemerintah, dan 7) belum tersedianya tenaga didik profesional.

b. Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Mutu Pendidikan

Pendidikan dasar adalah pendidikan umum yang lamanya 9 tahun. Komitmen Dakar menyepakati agar negara-negara "...memastikan bahwa pada tahun 2015 semua anak—terutama perempuan, anak di lingkungan yang kurang menguntungkan, dan anak dari golongan

minoritas—memiliki akses terhadap dan menyelesaikan pendidikan dasar yang bermutu.”

Secara nasional, akses terhadap Sekolah Dasar dari anak usia 7-12 tahun bisa dikatakan sudah sangat baik dan hampir mencapai keseluruhan. Sampai tahun 2000/2001, di seluruh Indonesia prosentase anak yang masuk ke SD sebesar 94,04%, yang berarti 5,96% atau sekitar 1.515.000 orang belum terlayani oleh pendidikan SD ini. Sedangkan tingkat pendidikan SMP masih jauh di bawah itu. Kelompok usia 13-15 tahun yang jumlahnya mencapai 12.972.000 orang, baru 45,10% yang memperoleh akses ke pendidikan SMP.

Meskipun angka partisipasi di SD sudah hampir menyeluruh, tingkat kesenjangan antar propinsi, pedesaan dan perkotaan, anak perempuan dan laki-laki masih tetap ada dan harus mendapat perhatian. Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah mutu pendidikan. Selama ini alat ukur yang dipakai di Indonesia adalah rata-rata NEM siswa, ketersediaan buku teks, dan jumlah siswa yang berhasil melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Secara nasional, NEM SD yang dicapai adalah 6,11 dan yang mendapat nilai rata-rata NEM di atas 5,5 hanya 36,79% saja.

c. Pendidikan Keaksaraan dan Berkelanjutan

Deklarasi Dakar menargetkan tercapainya 50% tingkat melek huruf orang dewasa terutama perempuan dan akses pendidikan berkelanjutan bagi semua pada tahun 2015. Literacy atau melek huruf ditafsirkan sebagai melek aksara latin dan angka arab, melek bahasa Indonesia dan pendidikan dasar. Pada tahun 2000 angka buta aksara perempuan umur 25 tahun ke atas adalah 21,2% dan laki-laki 4,7%. Jika angka peningkatan yang pernah dicapai pemerintah dipertahankan, maka pada tahun 2015 angka tersebut menjadi -2,7% untuk perempuan dan -0,26% untuk laki-laki.

d. Pendidikan Berkeadilan Gender

Target yang ingin dicapai dalam Deklarasi Dakar adalah mengurangi kesenjangan gender pada tahun 2015 dan mencapai kesetaraan gender pada tahun 2015. Dari serangkaian data yang dimiliki pemerintah, maka dapat disimpulkan disparitas jender pada penduduk pedesaan usia 15-24 tahun tidak akan hilang hingga tahun 2015 jika tidak ada intervensi yang sungguh-sungguh dari semua pihak yang terkait. Hambatan ke arah persamaan ini cukup banyak, mulai dari faktor ekonomi dimana perem-

puan dianggap lebih baik bekerja di dapur daripada menghabiskan uang untuk sekolah, sampai pada kurangnya sosialisasi wacana jender ke masyarakat-masyarakat umum, baik desa maupun kota.

D. Apa yang Perlu Dilakukan?

Belajar dari pengalaman dan kejadian masa lalu adalah salah satu metode untuk bisa mengambil tindakan ke depan, demikian juga dengan gerakan Pendidikan untuk Semua. Dari penjelasan tentang perkembangan pendidikan setelah Jomtien dan Dakar di atas bisa disimpulkan bahwa di tingkat global kemajuan sebagaimana ditargetkan oleh Deklarasi Jomtien dan Dakar belum begitu menggembirakan. Dalam *Global Monitoring Report* yang dipublikasikan pada 13 November 2002 disebutkan bahwa, setelah dua setengah tahun semenjak Deklarasi Dakar tahun 2000, setengah dari seluruh negara yang ikut menandatangani deklarasi ini tidak akan mencapai target Pendidikan untuk Semua. Bahkan, sebagaimana disebutkan oleh Syahgena Ardhila (*Broken Promises-EFA Campaign Illustrations in Selected ASEAN Countries, 2002*), negara-negara tersebut tidak hanya tertinggal tetapi justru mengalami kemunduran.

Hambatan-hambatan gerakan Pendidikan untuk Semua datang dari berbagai pihak. Selain masalah finansial, masalah lain yang juga signifikan adalah kemauan politik dari badan-badan internasional, pemerintah, serta masyarakat sipil dan kerja sama diantara mereka. Secara umum, sebagaimana disebutkan oleh laporan pendidikan Oxfam 2000, kegagalan terbesar ada pada pengembangan perencanaan yang koheren untuk mencapai target. Dengan kata lain, strategi politik dan finansial belum terbangun secara sinergis.

Lebih jauh lagi laporan ini menyebutkan bahwa negara-negara berkembang gagal menerjemahkan pentingnya pendidikan ke dalam penyediaan budget yang memadai. Sedangkan negara-negara maju gagal memberikan penambahan bantuan, penghapusan hutang, dan reformasi yang lebih luas lagi, yang diperlukan untuk mewujudkan target pendidikan bagi negara-negara berkembang dan miskin.

Bersamaan dengan rencana aksi globalnya tahun 2003, GCE yang memprioritaskan pendidikan bagi perempuan, menyerukan kepada pemerintah, badan-badan internasional, dan lembaga donor untuk melakukan tindakan kolektif untuk mencapai target-target dalam Deklarasi Dakar. Tindakan kolektif tersebut adalah:

Pemerintah harus:

- Serius membuat target yang konkret dan mengalokasikan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai target tersebut. Prioritas-prioritas dan indikator yang akan dicapai pada tahun 2005 harus dimasukkan ke dalam budget nasional, strategi pengurangan kemiskinan dan perencanaan sektor pendidikan.
- Mengurangi beban yang ditanggung oleh keluarga untuk mengirim anak perempuan ke sekolah, menghilangkan biaya SPP, menyediakan buku, seragam, dan makanan tambahan gratis.
- Menangani kasus pekerja anak. Banyak anak perempuan yang bekerja dan pekerjaan mereka seringkali vital untuk keluarga mereka. Jika mengirim anak ke sekolah berarti hilangnya income keluarga miskin, maka pemerintah harus memberikan uang pengganti income yang harus hilang karena pergi ke sekolah. Mempekerjakan anak apalagi yang membahayakan keselamatan anak harus dihentikan secepatnya—sebagaimana tertera dalam konvensi ILO 182.
- Menghargai hak anak perempuan di sekolah, memastikan

bahwa sekolah memperhatikan keselamatan dan kehormatan anak perempuan – mulai dari kebutuhan dasar seperti penyediaan toilet yang terpisah, sekolah menghentikan tindakan kekerasan dan pelecehan terhadap anak perempuan di sekolah, sekolah berhenti mengeluarkan anak perempuan dan ibu muda yang hamil, sekolah memasukkan pencegahan HIV/AIDS dan kecakapan hidup dalam kurikulum.

- Mendidik anak perempuan dan perempuan dewasa. Perempuan mendapatkan proses pemberdayaan melalui pendidikan orang dewasa dan ibu yang melek aksara lebih memiliki kecenderungan untuk mengirim anak mereka ke sekolah.

Lembaga internasional dan lembaga donor harus:

- Serius memberikan bantuan lebih banyak dengan perencanaan pendidikan yang lebih menggunakan perspektif gender, seperti kepada 18 negara yang masuk dalam *the First Track Initiative*. Untuk mencapai pendidikan dasar menyeluruh dan menghilangkan kesenjangan gender dalam angka partisipasi hanya menghabiskan USD \$5.6

milyar setiap tahun. Tetapi negara-negara kaya hanya memberikan seperempatnya saja, dan hanya 2% dari bantuan yang diberikan dialokasikan untuk pendidikan.

- Berhenti menduplikasi upaya, lembaga donor harus mengeluarkan semua sumber dayanya untuk mendukung kerangka aksi nasional yang ditargetkan pada tahun 2005 dan berhenti memanfaatkan utang tersebut untuk proyek-proyek kecil mereka sendiri.
- Memberikan prioritas yang lebih besar terhadap target tahun 2005 sebagai langkah pertama untuk mencapai tujuan lain untuk mengurangi kemiskinan pada tahun 2015.

Gerakan Pendidikan untuk Semua ini tentu tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah dan lembaga internasional atau lembaga donor. Partisipasi masyarakat dalam

hal ini sangat dibutuhkan. Oleh karenanya menjadi penting bagi NGOs, lembaga pendidikan dan siapapun yang memiliki komitmen terhadap pendidikan di Indonesia untuk memahami pesan Pendidikan untuk Semua dan apa yang bisa dilakukan untuk mencapai target pendidikan yang disepakati dalam Deklarasi Dakar.□

DAFTAR PUSTAKA

Ardhila, Syahgena. 2002. *Broken Promises- EFA Campaign Illustrations in Selected ASEAN Countries*. Unpublished paper.

Watkins, Kevin. 2000. *The Oxfam Education Report*. Oxfam GB in association with Oxfam International. Oxford.

www.educationforcampaign.org

www.oxfam.org

www.unesco.org